



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR : 171/Kep.03-DPRD/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 171/KEP.17-DPRD/2019 TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT
MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut telah menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut terakhir Nomor 171/Kep.07-DPRD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 171/Kep.17-DPRD/2019 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan 2019-2024;
- b. Bahwa dengan telah diterimanya surat dari Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Garut tanggal 15 Februari 2021 Perihal Rotasi/Mutasi alat Kelengkapan DPRD Fraksi Partai Golkar, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 171/Kep.17-DPRD/2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan DPRD Nomor 171/Kep.07 -DPRD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan DPRD Nomor 171/Kep.17-DPRD/2019 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan 2019-2024;.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 56).

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Garut tanggal 15 Februari 2021 Perihal Rotasi/Mutasi alat Kelengkapan DPRD Fraksi Partai Golkar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 171/KEP.17-DPRD/2019 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024;**

KESATU : Ketentuan dalam lampiran I, II dan IV Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 171/Kep.17-DPRD/2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 171 /Kep. 07 -DPRD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 171/Kep.17-DPRD/2019 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan 2019-2024, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. ;

KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 171/Kep.17-DPRD/2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 171 /Kep. 07 -DPRD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 171/Kep.17-DPRD/2019 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan 2019-2024, sepanjang tidak diadakan perubahan, dinyatakan tetap berlaku ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Garut
pada tanggal, 9 Maret 2021

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKRAT DAERAH
KABUPATEN GARUT,**

EUIS IDA WARTIAH

Lampiran I Keputusan DPRD Kabupaten Garut

Nomor : 171/Kep.03-DPRD/2021

Tanggal : 9 Maret 2021

KOMISI – KOMISI

KOMISI	BIDANG TUGAS	N A M A	JABATAN
I	<p><u>PEMERINTAHAN :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>Komunikasi dan Informatika</u> 2. <u>Otonomi Daerah</u> 3. <u>Perizinan</u> 4. <u>Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat</u> 5. <u>Kepegawaian</u> 6. <u>Kependudukan dan Cacatan Sipil dan;</u> 7. <u>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</u> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. SUBHAN FAHMI, S.IP 2. Rd. YAYUK TIEN RAHAYU 3. MUCHTARUL WILDAN 4. DEDEN SOPIAN. SHI 5. NITA MUSTIKA UTAMI, SE 6. H. DIAN MISPARONI 7. DADAN WANDIANSYAH, S.IP 8. HASAN BASRI 9. DADANG SUDRAJAT, S.Pd 10. H. ALIT SUHERMAN, S.Pd 	<p>KETUA</p> <p>WAKIL KETUA</p> <p>SEKRETARIS</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>
II	<p><u>PEBANGUNAN AGRIKULTUR DAN SUMBER DAYA ALAM :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan umum dan penataan ruang; 2. Perumahan dan pemukiman; 3. Ketahanan pangan; 4. Lingkungan hidup; 5. Perhubungan; 6. Perikanan; 7. Peternakan; 8. Energy dan sumber daya mineral; 9. Pertanian; 10. Perencanaan pembangunan daerah; dan 11. Penanggulangan bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. H. NADIMAN 2. HAMZAH, A.Md 3. H. RIKI MUHAMAD SIDIQ, S.Sos. 4. ARIS MUNANDAR, S.IP 5. AGUS M SUTARMAN, SE 6. Drs. H. DEDI SURYADI S, BE, M.Si 7. IRFAN AGUSTIANA 8. DILA NURUL PADILAH, SE 9. JUJU HARTATI, S.Sos 10. JAJANG SUPRIATNA, S.HI 11. AJI KURNIA 	<p>KETUA</p> <p>WAKIL KETUA</p> <p>SEKRETARIS</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>

KOMISI	BIDANG TUGAS	N A M A	JABATAN
III	<p><u>EKONOMI KEUANGAN DAN INDUSTRI :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koperasi, usaha kecil, dan menengah; 2. Penambahan modal; 3. Pariwisata; 4. Perindustrian; 5. Perdagangan; 6. Keuangan dan asset daerah; dan 7. Pendapatan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hj. RINI SRI RAHAYU, S.Ag, M.Si 2. YUSUF MUSYAFFA, Lc 3. SAMSUDIN, SE 4. Hj. MILA MELIANA 5. ASEP MULYANA 6. LULU GANDHI NAN RAJATI, SE, M.Si 7. AYI SURYANA 8. Ir. H. YAYAT HIDAYAT 9. MAMAT RAHMAT 10. DEDE SALAHUDIN 11. CUCU SUHENDAR, S.Pd, M.AP 12. IHAT SOLIHAT 	<p>KETUA</p> <p>WAKIL KETUA</p> <p>SEKRETARIS</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>
IV	<p><u>BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan; 2. Kesehatan; 3. Sosial; 4. Tenaga kerja dan transmigrasi; 5. Pengendalian penduduk; 6. Keluarga berencana; 7. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 8. Pemuda dan olah raga; 9. Kebudayaan; dan 10. Perpustakaan dan kearsipan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. ADE RIJAL, S.Ag 2. KARNOTO, S.Kep, M.Si 3. IWAN SETIAWAN, IB 4. H. AKHMAD MULYANA, S.Pdi 5. TATANG SUMIRAT, S.IP 6. ADE HUSNA, S.Pdi, MM.Pd 7. IRWANDANI, S.IP, M.Si 8. TAUFIK HIDAYAT, SH.I 9. Drs. DUDEH RUHIAT, M.Pd 10. YUDHA PUJA TURNAWAN 11. MAS YAYU SITI SAPURO, S.Pt 12. WITRI ASRINI, S.Kom 13. H. IDEN SAMBAS, S.Pdi 	<p>KETUA</p> <p>WAKIL KETUA</p> <p>SEKRETARIS</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p> <p>ANGGOTA</p>

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT**

Ketua,

EUIS IDA WARTIAH

Lampiran II Keputusan DPRD Kabupaten Garut**Nomor : 171/Kep.03-DPRD/2021****Tanggal : 9 Maret 2021****BADAN MUSYAWARAH**

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Dra. Hj. EUIS IDA WARTIAH, M.Si	Ketua Merangkap Anggota
2.	ENAN	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	H. AGUS HAMDANI, GS, S.Pdi	Wakil Ketua Merangkap Anggota
4.	H.R. MOCHAMAD ROMLI, S.IP, M.Si	Wakil Ketua Merangkap Anggota
5.	Drs. DEDY MULYADI, MH	Sekretaris Bukan Anggota
6.	Drs. H. NADIMAN,	Anggota
7.	Hj.MILA MELIANA	Anggota
8.	SYAMSUDIN	Anggota
9.	H. ADE RIJAL, S.Ag	Anggota
10.	Rd. YAYUK TIEN RAHAYU	Anggota
11.	H. DIAN MISPARONI	Anggota
12.	Hj. RINI SRI RAHAYU, S.Ag, M.Si	Anggota
13.	ADE HUSNA, SPdi, MM.Pd	Anggota
14.	IRWANDANI, SIP, M.Si	Anggota
15.	HAMZAH, A.Md	Anggota
16.	MUCHTARUL WILDAN	Anggota
17.	Drs. DUDEH RUHIAT, M.Pd	Anggota
18.	YUDHA PUJA TURNAWAN	Anggota
19.	IWAN SETIAWAN, IB	Anggota
20.	DEDE SALAHUDIN	Anggota
21.	HASAN BASRI	Anggota
22.	CUCU SUHENDAR, SPd, M.AP	Anggota
23.	H. RIKI MUHAMAD SIDIQ, S.Sos	Anggota
24.	WITRI ASRINI, S.Kom	Anggota
25.	IHAT SOLIHAT	Anggota
26.	AJI KURNIA	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT**

Ketua,

EUIS IDA WARTIAH

Lampiran III Keputusan DPRD Kabupaten Garut**Nomor : 171/Kep.03-DPRD/2021****Tanggal : 9 Maret 2021****BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH**

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Drs. DUDEH RUHIAT, M.Pd	KETUA MERANGKAP ANGGOTA
2.	IRFAN AGUSTIANA	WAKIL KETUA MERANGKAP ANGGOTA
3.	Drs. DEDY MULYADI, MH	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA
4.	DEDEN SOPIAN, S.HI	ANGGOTA
5.	H. AKHMAD MULYANA, S.Pdi	ANGGOTA
6.	TATANG SUMIRAT, S.IP	ANGGOTA
7.	Drs. H. DEDI SURYADI S, BE, M.Si	ANGGOTA
8.	AGUS M SUTARMAN, SE	ANGGOTA
9.	AYI SURYANA	ANGGOTA
10.	IRWANDANI, SIP, M.Si.	ANGGOTA
11.	HASAN BASRI	ANGGOTA
12.	H. DADANG SUDRAJAT, S.Pd	ANGGOTA
13.	H. ALIT SUHERMAN, S.Pd	ANGGOTA
14.	H. IDEN SAMBAS, S.Pdi	ANGGOTA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT**

Ketua,

EUIS IDA WARTIAH

Lampiran IV Keputusan DPRD Kabupaten Garut**Nomor : 171/Kep.03-DPRD/2021****Tanggal : 9 Maret 2021****BADAN ANGGARAN**

NO.	N A M A	JABATAN
1.	Dra. Hj. EUIS IDA WARTIAH, M.Si	Ketua Merangkap Anggota
2.	ENAN	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	H. AGUS HAMDANI, GS, S.Pdi	Wakil Ketua Merangkap Anggota
4.	H. R. MOCHAMAD ROMLI, S.IP	Wakil Ketua Merangkap Anggota
5.	Drs. DEDY MULYADI, MH	Sekretaris Bukan Anggota
6.	H. AKHMAD MULYANA, S.Pdi	Anggota
7.	ARIS MUNANDAR, S.Pd	Anggota
8.	NITA MUSTIKA UTAMI, SE	Anggota
9.	ASEP MULYANA	Anggota
10.	LULU GANDHI NAN RAJATI, SE, M.Si	Anggota
11.	Drs. H. DEDI SURYADI S, BE, M.Si	Anggota
12.	AYI SUYANA	Anggota
13.	DILA NURUL PADILAH, SE	Anggota
14.	Hj. RINI SRI RAHAYU, S.Ag, M.Si	Anggota
15.	Ir. H. YAYAT HIDAYAT	Anggota
16.	TAUFIK HIDAYAT, SH.I	Anggota
17.	JUJU HARTATI, S.Sos	Anggota
18.	DADAN WANDIANSYAH, S.IP	Anggota
19.	MAMAT RAHMAT	Anggota
20.	JAJANG SUPRIATNA, SHI	Anggota
21.	YUSUF MUSYAFFA, Lc	Anggota
22.	MAS YAYU SITI SAPURO, S.Pt	Anggota
23.	CUCU SUHENDAR, S.Pd., M.AP	Anggota
24.	H. IDEN SAMBAS, S.Pdi	Anggota
25.	AJI KURNIA	Anggota
26.	H. SUBHAN FAHMI, S.IP	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT**

Ketua,

EUIS IDA WARTIAH

Lampiran V Keputusan DPRD Kabupaten Garut
Nomor : 171/Kep.03-DPRD/2021
Tanggal : 9 Maret 2021

BADAN KEHORMATAN

NO.	N A M A	JABATAN
1.	H. DADANG SUDRAJAT, S.Pd	KETUA
2.	H. ALIT SUHERMAN, S.Pd	WAKIL KETUA
3.	DEDEN SOPIAN, SH.I	ANGGOTA
4.	Drs. H. DEDI SURYADI S, BE, M.Si	ANGGOTA
5.	H. DIAN MISPARONI	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GARUT

Ketua,

EUIS IDA WARTIAH

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 56).

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Golkar DPRDKabupaten Garut tanggal 15 Februari 2021 Perihal Rotasi/Mutasi alat Kelengkapan DPRD Fraksi Partai Golkar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 171/KEP.17-DPRD/2019 TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN ALAT KELENGKAPAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT MASA JABATAN TAHUN 2019-2024;**

KESATU : Ketentuan dalam lampiran I Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 171/Kep.17-DPRD/2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 171 /Kep. 07 – DPRD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 171/Kep.17-DPRD/2019 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan 2019-2024, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini. ;

KEDUA : Ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 171/Kep.17-DPRD/2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 171 /Kep. 07 –DPRD/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Nomor 171/Kep.17-DPRD/2019 tentang Susunan Keanggotaan Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Masa Jabatan 2019-2024, sepanjang tidak diadakan perubahan, dinyatakan tetap berlaku ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Garut
pada tanggal, 9 Maret 2021

**KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKRAT DAERAH
KABUPATEN GARUT,**

EUIS IDA WARTIAH

